

PERSEBARAN PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

The Distribution of Population Do Not Have Paper Official Identities

Irdam Ahmad

STEKPI Jakarta

E-mail: irdam@stekpi.ac.id

ABSTRACT

There are two main problems of population administration system in Indonesia. Firstly, population data is not well managed and overlapped among many government institutions. Secondly, many people do not possess population documents because they did not report any vital events that have been occurred in their family, such as birth, death, move in and move out. These problems then cause list of election voters (DPT) in 2009 general election (Pemilu) are not valid. This study would like to know geographic maps of people that do not possess population documents by province. In addition, this study also search factors affecting people that do not possess paper official identities, using logistic regression. The results show that out of six independent variables used in this study; age and education of head of household, distance to village office, village status (urban/rural), household income and number of household members, only distance to village office which is significant in influence people do not possess population documents.

Keywords: maps, population documents, logistic regression

ABSTRAK

Ada dua masalah utama pada sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Pertama, data kependudukan tidak dikelola secara terintegrasi sehingga terjadi tumpang tindih antara beberapa instansi pemerintah. Kedua, banyak penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan, karena mereka tidak melaporkan berbagai peristiwa kependudukan yang terjadi di lingkungan keluarga mereka, misalnya kelahiran, kematian, pindah, datang, dan lain-lain. Kedua masalah ini telah menyebabkan data penduduk yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009 menjadi tidak akurat. Penelitian ini ingin mengetahui peta wilayah penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan menurut propinsi. Disamping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini, yaitu umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, jarak dari rumah ke kantor desa, status desa (urban atau rural), pendapatan rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga, hanya variabel jarak dari rumah ke kantor desa yang secara nyata mempengaruhi penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan.

Kata kunci: peta wilayah, dokumen kependudukan, regresi logistik

PENDAHULUAN

Ketika terjadi masalah pada data penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pemilu 2009 yang lalu, banyak pihak yang mempertanyakan validitas data kependudukan di Indonesia. Hasil audit yang dilakukan oleh LP3ES menunjukkan bahwa 20,8 % pemilih belum terdaftar pada daftar pemilih; 19,8 % nama yang terdapat dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut (sudah pindah atau meninggal), dan 3,3 % nama pada daftar pemilih tidak valid, baik karena sudah meninggal, tidak dikenal atau belum berusia 17 tahun (Nursahid, 2009). Diperkirakan, sekitar 49,7 juta penduduk tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 yang lalu (www.kpu.go.id).

Secara umum, ada dua masalah pokok pada sistem administrasi kependudukan yang menyebabkan tidak *valid* nya data kependudukan di Indonesia (Ahmad, 2011a). Pertama, pengelolaan data kependudukan diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah yang berbeda-beda, sehingga data jumlah penduduk tidak pernah sama antara satu instansi dengan instansi yang lain. Kedua, sebagian penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP atau Akta Kelahiran, karena mereka tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang terjadi di keluarga mereka, misalnya adanya kelahiran, pindah, datang, meninggal, dan lain-lain, untuk mengurus dokumen kependudukan. Akibat kedua masalah tersebut, pemerintah sering kesulitan dalam memutakhirkan data penduduk.

Biaya yang relatif mahal (antara Rp 25.000–Rp 50.000, termasuk ongkos transpor pulang pergi ke kec/kota) untuk mengurus KK, KTP dan Akta Kelahiran, serta menghabiskan waktu yang cukup lama

(antara 3-12 hari) untuk mengurusnya, telah menyebabkan banyak penduduk enggan mengurusnya, terutama yang tinggal di daerah pedesaan (Ahmad, 2011b).

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui peta wilayah geografis penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran, menurut propinsi, dan, kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan.

Dengan mengetahui peta wilayah geografis penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan, diharapkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia.

Penelitian dari *Polling Center* (2004), menyimpulkan bahwa biaya yang mahal, tidak mengetahui manfaat dan jarak yang jauh, merupakan tiga faktor utama yang menyebabkan penduduk tidak mau mengurus akta kelahiran untuk anaknya.

Di samping jarak dan pendapatan, penelitian ini juga menggunakan variabel umur, tingkat pendidikan dan klasifikasi desa *urban/rural*, sebagai variabel bebas yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keinginan seseorang untuk memiliki dokumen kependudukan. Menurut Colledge (2005), jarak adalah suatu konsep spasial yang menunjukkan lokasi antara dua buah titik yang terpisah secara geografis. Sedangkan menurut Getis, dkk (2000), jarak merupakan salah satu dari tiga topik geografis penting, disamping lokasi dan arah. Astuti dan Musiyam (2009)

menyatakan bahwa secara umum, semakin jauh jarak suatu wilayah dari pusat kota, maka tingkat aksesibilitas wilayahnya akan semakin rendah.

Mengenai klasifikasi desa *urban*, penelitian ini menggunakan konsep BPS, dimana suatu desa dikatakan desa *urban* jika kepadatan penduduknya rendah, persentase rumah tangga petani besar dan ketersediaan fasilitas urban sedikit. Menurut Giyarsih (2010), ketersediaan fasilitas sosial ekonomi juga merupakan salah satu variabel yang dapat mencerminkan sifat kekotaan di suatu wilayah.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tahun 2005, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai dasar pembuatan peta. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan data primer, yang dilakukan di tiga desa dalam wilayah propinsi Banten, yaitu Margaluyu, (Kabupaten Serang), desa Cibuah (Kabupaten Lebak) dan Kelurahan Parungserab (Kota Tangerang), tahun 2009, dengan jumlah sampel sebanyak 117 Kepala Keluarga.

Metode Analisis

Analisis Deskriptif dan Peta

Analisis deskriptif dan peta digunakan untuk mendeskripsikan wilayah penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Kelahiran) menurut propinsi.

Analisis Regresi Logistik

Model regresi logistik digunakan karena variabel terikat mempunyai dua kategori,

yaitu $Y=1$ untuk yang tidak memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK dan Akta Kelahiran), dan $Y=0$ untuk yang memiliki dokumen kependudukan. Sedangkan daftar variabel bebas yang digunakan terdapat pada Tabel 1.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian untuk setiap variabel bebas terhadap variabel terikat (kepemilikan dokumen kependudukan), adalah sbb : (1) jarak mempunyai pengaruh negatif, (2) umur mempunyai pengaruh positif, (3) tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif, (4) pendapatan mempunyai pengaruh positif, (5) jumlah anggota keluarga mempunyai pengaruh negatif, dan (6) klasifikasi desa (*urban*) mempunyai pengaruh positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Penduduk yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

Hasil Supas tahun 2005 menunjukkan bahwa 18,26 % (26,2 juta orang) penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas ternyata tidak memiliki KTP (Tabel 2). Alasan utama penduduk tidak mau mengurus KTP adalah karena mereka tidak membutuhkan KTP, apalagi biaya pembuatannya juga cukup mahal bagi ukuran mereka. Menurut sebagian besar responden, mengurus KTP hanya menghabiskan uang dan waktu saja, sedangkan manfaatnya tidak ada, karena mereka jarang pergi keluar kota dan tidak pernah berhubungan dengan Bank atau instansi pemerintah lainnya. Mereka baru mau mengurus KTP kalau sudah sangat terpaksa, misalnya mau kredit motor untuk ojek, mencari pekerjaan, mau naik haji, dan lain-lain.

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa lebih dari 33,74 % penduduk yang tinggal di

propinsi-propinsi wilayah Indonesia Bagian Timur, tidak memiliki KTP, kecuali Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sedangkan di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah, propinsi-propinsi yang penduduknya banyak yang tidak memiliki KTP (antara 24,23 - 33,73 %) antara lain adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, NTB dan NTT. Perlu juga diketahui, bahwa data untuk DI Aceh

tidak tersedia, sehingga angkanya adalah nol persen. Sedangkan untuk propinsi Riau, datanya masih mencakup wilayah propinsi Riau yang lama (sebelum pemekaran), dan belum dipisah dengan propinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, untuk kepemilikan Kartu Keluarga (KK), dari 54,1 juta keluarga yang ada di seluruh Indonesia, dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa sekitar 22,3 % atau 12,1

Tabel 1. Kategori Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Variabel	Nama Variabel	Kategori	Variabel Boneka
D ₁	Jarak ke Kantor Desa	1. Jauh ; > 690 m	D ₁₁ = 1
		2. Dekat ; = 690 m	D ₁₂ = 0
D ₂	Umur Kepala Rumah Tangga (ruta)	1. Kurang Dari 40	D ₂₁ = 1
		2. 40 atau lebih	D ₂₂ = 0
D ₃	Tingkat Pendidikan Kepala Ruta	1. SD atau kurang	D ₃₁ = 1
		2. SLTP atau lebih	D ₃₂ = 0
D ₄	Pendapatan Keluarga	1. Kurang ; = 600.000	D ₄₁ = 1
		2. Cukup ; > 600.000	D ₄₂ = 0
D ₅	Jumlah Anggota Keluarga	1. Banyak ; > 4 orang	D ₅₁ = 1
		2. Sedikit : = 4 orang	D ₅₂ = 0
D ₆	Klasifikasi Tempat Tinggal	1. Desa Rural	D ₆₁ = 1
		2. Desa Urban	D ₆₂ = 0
Variabel Terikat	Memiliki dokumen kependudukan	1. Tidak Memiliki	Y = 1
		2. Memiliki	Y = 0

Sumber: hasil analisis

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, dan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2005

Dokumen Kependudukan	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
KTP	117.180.815 (81,74)	26.184.344 (18,26)	143.365.159 (100,0)
Kartu Keluarga	42.009.761 (77,69)	12.066.755 (22,31)	54.076.516 (100,0)
Akta Kelahiran	8.176.319 (42,82)	10.918.832 (57,18)	19.095.151 (100,0)

Sumber: BPS, Supas 2005

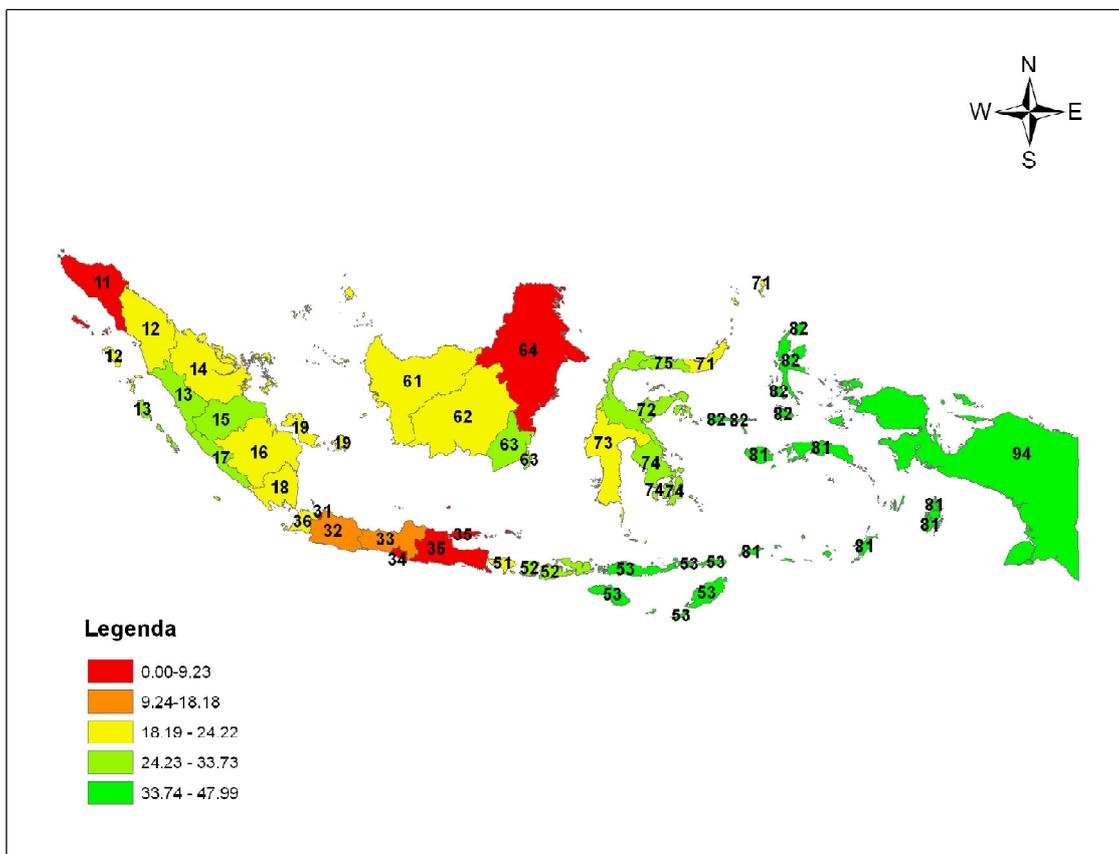
juta keluarga tidak mempunyai KK. Bagi sebagian penduduk, memiliki KK sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau KTP masih bisa digunakan ketika bepergian, kredit motor, mencari pekerjaan, dan lain-lain, KK sama sekali tidak bisa digunakan. Karena itu, walaupun peraturan untuk memiliki KTP harus memiliki KK terlebih dahulu, banyak penduduk yang hanya mengurus KTP, tetapi tidak memiliki KK.

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa antara 43,61 - 59,20 % keluarga yang tinggal di propinsi Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, NTT dan NTB, tidak memiliki KK. Sedangkan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung, persentase yang tidak memiliki KK adalah antara 30,16 - 43,60 %. Di

propinsi Kalimantan Timur, persentase keluarga yang tidak memiliki KK hanya kurang dari 6,67 %, dan ini merupakan yang terbaik dalam kepemilikan KK.

Data hasil Supas tahun 2005 juga memuat cakupan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 0-4 tahun (Balita). Dibandingkan dengan kepemilikan KTP dan KK, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran jauh lebih rendah. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 19,1 juta orang Balita yang ada di Indonesia tahun 2005, sebanyak 10,9 juta orang diantaranya atau 57,2 % tidak memiliki Akta Kelahiran.

Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak di Indonesia jauh lebih rendah. Di Philipina misalnya, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak



Sumber: hasil analisis

Gambar 1. Presentase Penduduk yang Tidak Memiliki KTP Menurut Propinsi

mencapai 84 %, sedangkan di Thailand dan Malaysia, cakupannya masing-masing sebesar 95 % dan 98 % di Malaysia (Kompas, 27 Mei 2005). Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa antara 70,71 - 84,09 % Balita di propinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku, tidak memiliki Akta Kelahiran. Sedangkan di propinsi Jambi, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, persentase Balita yang tidak mempunyai Akta Kelahiran adalah antara 20,57–51,75 %, dan ini merupakan yang terbaik.

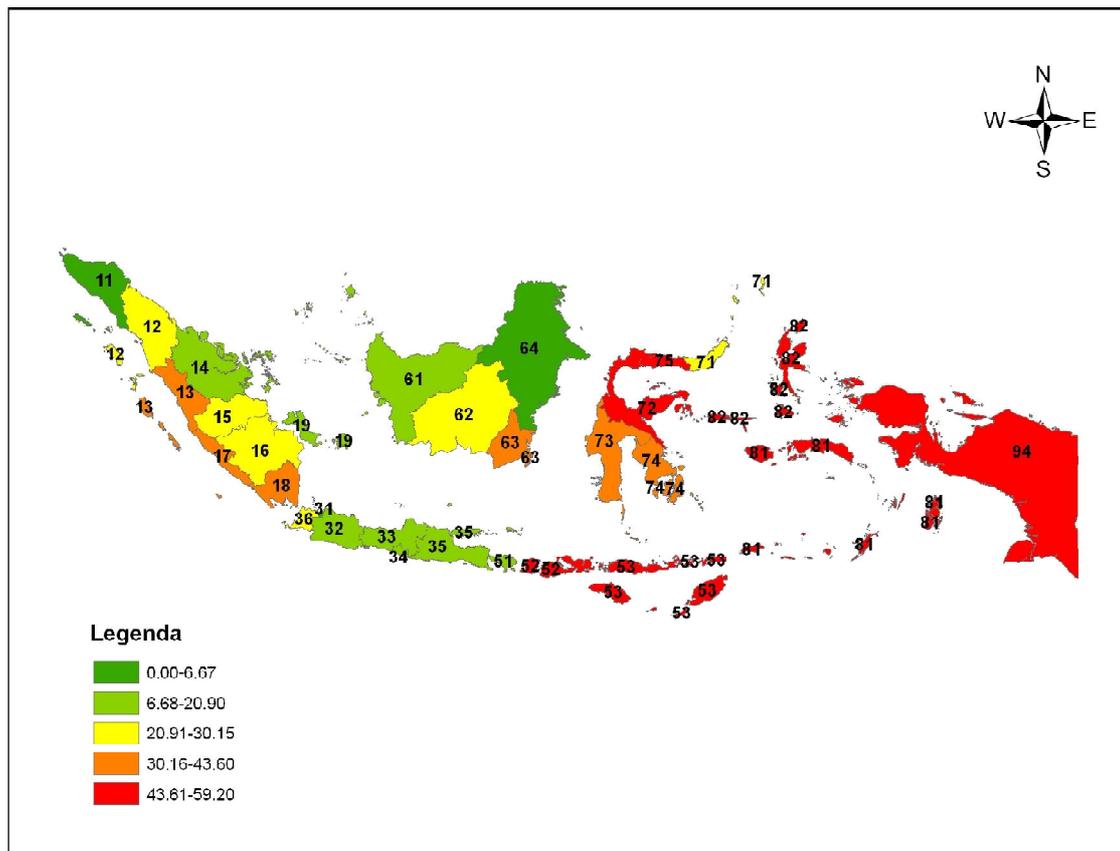
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penduduk untuk

memiliki berbagai dokumen kependudukan, digunakan analisa regresi logistik berganda.

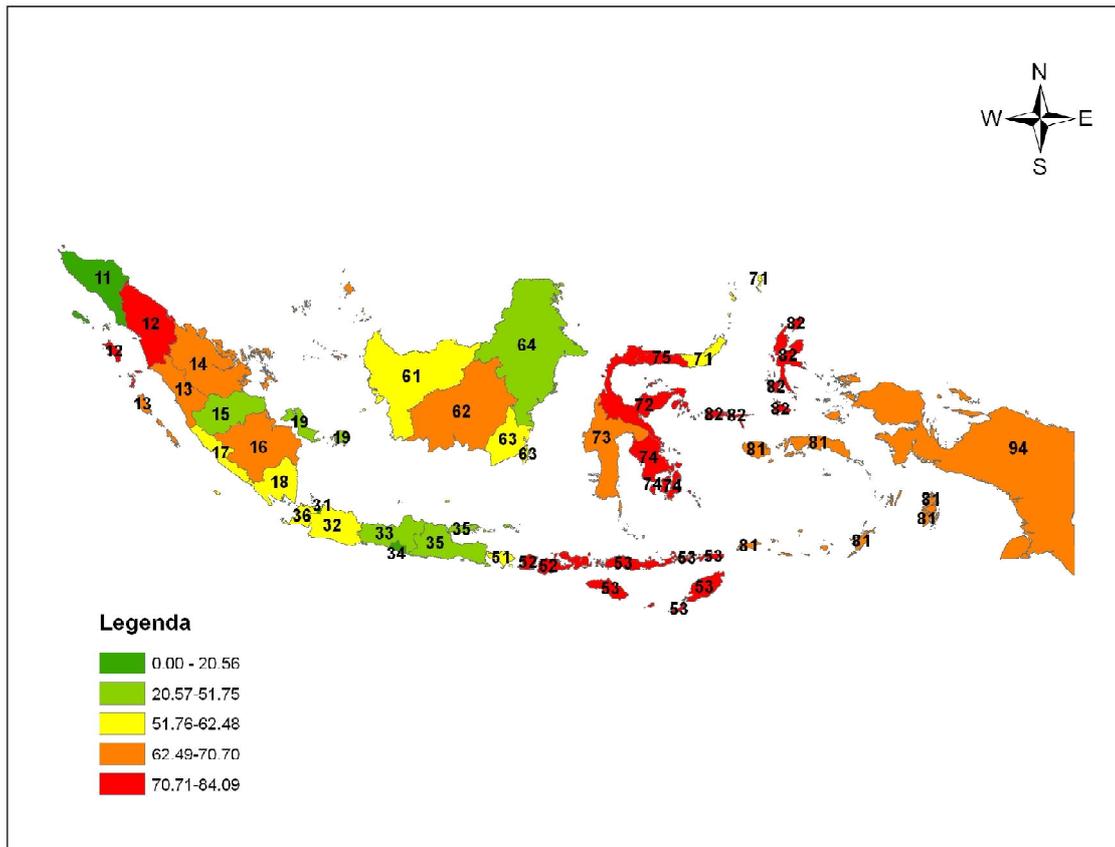
Tabel 3 menunjukkan ada lima variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap perilaku seseorang tidak memiliki dokumen kependudukan, yaitu jarak dari tempat tinggal ke kantor desa/kelurahan, serta interaksi antara tempat tinggal (T.TGL) dengan pendapatan (PP), interaksi umur (U) dengan jumlah keluarga (J.ART), interaksi pendapatan (PP) dengan jumlah keluarga (J.ART) serta interaksi antara tempat tinggal (T.TGL) dengan umur (U).

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa kelima variabel yang terdapat pada Tabel 3 berpengaruh secara *significant* terhadap variabel terikat.



Sumber: hasil analisis

Gambar 2. Presentase Keluarga yang Tidak Memiliki Kartu Keluarga Menurut Propinsi



Sumber: hasil analisis

Gambar 3. Presentase Balita yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Propinsi

Tabel 3. Output SPSS Hasil Analisis Regresi Logistik

		Variables in the Equation					Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
		B	S.E.	Wald	df	Sig.		Lower	Upper
Sjep 1	JARAK	1.345	.429	9.821	1	.002	3.838	1.655	8.899
	T.TGL_PP	-1.409	.609	5.350	1	.021	.244	.074	.806
	U_J.ART	-2.025	.892	5.157	1	.023	.132	.023	.758
	PP_J.AR	1.550	.640	5.861	1	.015	4.713	1.343	16.535
	T.TGL_U	1.801	.662	7.394	1	.007	6.058	1.654	22.193
Constant		-.794	.350	5.152	1	.023	.452		

a. Variable(s) entered on step 1: JARAK, T.TGL_PP, U_J.ART, PP_J.AR, T.TGL_U.

Sumber: hasil analisis

Catatan :

Jarak adalah jarak dari tempat tinggal ke kantor desa/kelurahan

T.TGL_PP adalah interaksi antara tempat tinggal dengan pendapatan

U_J.ART adalah interaksi umur dengan jumlah anggota keluarga (ruta)

PP_J.ART adalah interaksi antara pendapatan dengan jumlah angg ruta

T.TGL_U adalah interaksi antara tempat tinggal dengan umur

Variabel jarak memiliki koefisien positif yang menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempat tinggal seseorang dari kantor desa/kelurahan, maka semakin besar peluangnya untuk tidak memiliki dokumen kependudukan.

Interpretasi untuk variabel interaksi adalah bahwa secara bersama-sama (saling berinteraksi), kedua variabel tersebut berpengaruh secara *significant* terhadap variabel terikat.

Tabel 3 juga memuat nilai eksponen terhadap koefisien regresi logistik dari setiap variabel bebas, yaitu kolom Exp (B). Untuk variabel jarak, dengan koefisien regresi logistik 1,345, maka nilai eksponennya, $e^{1,345} = 3,838$. Nilai Exp (B) disebut *odds ratio* atau rasio kecenderungan seorang kepala keluarga tidak memiliki dokumen kependudukan.

Odds ratio untuk variabel jarak sebesar 3,838, berarti kecenderungan seorang kepala keluarga yang jarak tempat tinggalnya lebih dari 690 m dari kantor desa/kelurahan tidak memiliki dokumen kependudukan adalah 3,838 kali lebih besar dibandingkan dengan kepala keluarga yang jarak tempat tinggalnya kurang dari 690 m.

Nilai *odds ratio* untuk interaksi antara variabel pendapatan dengan jumlah anggota keluarga sebesar 4,713 berarti kepala keluarga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 600.000 dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang mempunyai kecenderungan 4,713 kali lebih besar untuk tidak memiliki dokumen kependudukan dibandingkan dengan kepala keluarga yang mempunyai pendapatan lebih dari Rp 600.000 dengan jumlah anggota keluarga kurang dari 4 orang.

Estimasi Peluang Seseorang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

Model regresi logistik yang terbentuk dari hasil penelitian ini, seperti yang terdapat pada Tabel 3, juga bisa digunakan untuk menghitung peluang seseorang tidak memiliki dokumen kependudukan.

Contoh, jika seseorang tinggal 500 meter dari kantor desa ($D_{12} = 0$), berusia 35 tahun ($D_{21} = 1$), jumlah anggota keluarga 5 orang ($D_{51} = 1$), pendapatan sebesar Rp 750.000 ($D_{42} = 0$) dan tinggal di desa rural ($D_{61} = 1$), sehingga $D_{61} * D_{42} = 0$; $D_{21} * D_{51} = 1$; $D_{42} * D_{51} = 0$; $D_{61} * D_{21} = 1$.

Dengan memasukkan semua nilai tersebut kedalam model persamaan regresi logistik berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, maka peluang yang bersangkutan untuk tidak memiliki dokumen kependudukan diperkirakan sebesar 0,58.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan: **pertama**, persentase terbesar penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan terdapat di propinsi-propinsi yang ada wilayah timur Indonesia, **kedua**, dari enam variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini, ada lima variabel yang berpengaruh *significant* terhadap kepemilikan akta kelahiran, yaitu variabel jarak dari tempat tinggal ke kantor desa/kel dan empat variabel interaksi. Keempat variabel interaksi tersebut adalah antara tempat tinggal dengan pendapatan, umur dengan jumlah anggota keluarga, pendapatan dengan jumlah anggota keluarga serta antara variabel tempat tinggal dengan umur.

Untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia, pemerintah disarankan untuk. **Pertama**, memasukkan

materi tentang sistem administrasi kependudukan dalam mata pelajaran Geografi pada tingkat SMP dan SMA. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh penduduk Indonesia tentang manfaat dan pentingnya setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan, yang bisa dimulai dari tingkat SMP dan SMA.

Kedua, meningkatkan motivasi penduduk dalam memiliki dokumen kependudukan dengan menyederhanakan prosedur dan tata cara mengurus dokumen kependudukan, dan kalau perlu membebaskan biayanya.

Ketiga, memberikan KTP (elektronik), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran secara gratis kepada seluruh penduduk Indonesia yang belum memilikinya, tanpa syarat, termasuk kepada 26,2 juta penduduk yang tidak memiliki KTP, 12,1 juta keluarga yang

tidak memiliki KK dan 10,9 juta Balita yang tidak memiliki Akta Kelahiran, seperti yang terdapat pada Tabel 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian untuk Disertasi Doktor penulis, tentang "Perilaku Kepala Keluarga Dalam Mengurus Dokumen Kependudukan", yang dipertahankan tanggal 24 Februari 2011 di hadapan Senat Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Dr. Budiasih atas masukannya, Sdr. Ierene atas bantuan pembuatan peta dan kepada Sdr. Arif atas bantuannya dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2011a). *Perilaku Kepala Keluarga Dalam Mengurus Dokumen Kependudukan*, Disertasi Tidak Dipublikasikan, Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), Universitas Negeri Jakarta.
- Ahmad, I. (2011b). *Spanduk dan Stiker Sebagai Media Komunikasi untuk Melaporkan Peristiwa Kependudukan*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 9, No. 1, Januari-April, 2011
- Astuti, W.A. dan Musiyam, M. (2009). Kemiskinan dan Perkembangan Wilayah di Kabupaten Boyolali. *Forum Geografi*. Vol. 23, No. 1, Juli 2009.
- Badan Pusat Statistik (2007). *Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas)*, Jakarta..
- Colledge, R. (2005). *Geography and Everyday Live*, Directions Magazine, 12 September 2005.
- Getis, A.; Getis, J. dan Fellmann, J.D. (2000). *Introduction to Geography*, Mc. Graw Hill, seven edition.
- Giyarsih, S.R. (2010). Pola Spasial Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta-Surakarta. *Forum Geografi*. Vol. 24, No. 1, Juli 2010.
- Hosmer, D.W. and Lameshow, S. (1989), *Applied Logistic Regression*.

<http://www.kpu.go.id>, diunduh 12 Juli 2011.

Koran Kompas, 27 Mei 2005.

Nursahid, F. (2009). *Kisruh DPT, Rawan Gugatan*, Harian SINDO, 29 Maret 2009.

Polling Center (2004), *Communication Research For Birth Registration*, Prepared for UNICEF.